

Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kota Padang

Mahasir
Universitas PGRI Palembang
e-mail: mahasirnasir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran kepala sekolah dan guru, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif semua Sekolah Dasar Negeri Kota Padang yang melaksanakan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa peran guru dan kepala sekolah tentang pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kota Padang belum efektif. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa manajemen Pendidikan inklusif sudah berjalan, namun belum optimal dan perlu perbaikan. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penelitian serupa pada konteks yang berbeda untuk mengetahui masalah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif dalam rangka meningkatkan pengelolaan pendidikan inklusif.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan.

Abstract

The purpose of this research is to uncover the role of principals and teachers in the implementation of inclusive education in all Kota Padang State Elementary Schools that practice inclusive education. The qualitative method is used in this study. Data were gathered through interviews and observation. According to the findings, the role of teachers and principals in the implementation of Inclusive Education in Kota Padang State Elementary Schools has been ineffective. Based on the findings, it is possible to conclude that inclusive education management has been operating, but it is not yet optimal and requires improvement. This study suggests conducting similar research in different contexts to identify problems in the implementation of inclusive education in order to improve inclusive education management.

Keywords: *Inclusive Education, Elementary School, Education Management.*

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasal 31 (1) menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pengelolaan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, telah menjadi kesadaran dan komitmen masyarakat. Usaha ini didasarkan pada hak anak untuk memperoleh pendidikan inklusi yang layak. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 4 menyatakan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dalam hal ini anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda. Pembagian tersebut sesuai dengan kekhususan yang mereka miliki.

Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kementerian Pendidikan Nasional, Eko Jatmiko Sukarso (17 November 2009) di Hotel Sahid Kusuma Solo, pada sela Simposium Internasional dan Temu Ilmiah Nasional tentang Perkembangan Terkini Pendidikan Anak

Berkebutuhan Khusus dan Perannya Dalam Mewujudkan *Education For All*), mengatakakan bahwa “sebanyak 374.000 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia belum tertangani oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusi, sedangkan yang baru tertangani sebesar 66.000 ABK”. Kenyataan ini, harus segera ditangani mengingat saat ini telah hadir Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau/bakat istimewa, yang mengakomodir hak pendidikan bagi para ABK.

Implementasi manajemen pendidikan inklusi, mengacu pada pentingnya guru memahami perbedaan individual peserta didik bukan hal yang mudah. Guru perlu disiapkan dengan baik untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana untuk implementasi pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu.

Secara faktual di lapangan, sebagian dari anak berkebutuhan khusus dan anak berkesulitan belajar belum sepenuhnya mendapat perhatian untuk mendapatkan pendidikan secara maksimal. Orang tua dan masyarakat belum dapat berbuat banyak. Hal ini disebabkan karena semua proses pendidikan ditumpuhkan hanya kepada guru dan jajaran pendidikan saja. Seyogyanya, agar semua anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat ditampung di SLB. Salah satu penyebab masih terbatasnya jumlah SLB adalah biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa/reguler. Selain itu, SLB yang ada biasanya berlokasi di ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota, padahal anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebar di daerah yang sulit dijangkau aksesibilitas pendidikan inklusi. Kesulitan belajar (*learning disability*), terdiri dari kesulitan belajar umum seperti lamban belajar (*slow learner*), dan kesulitan belajar khusus yaitu kesulitan belajar pada bidang pelajaran tertentu saja misalnya kesulitan membaca (*disleksia*), kesulitan berhitung (*diskalkulia*) dan kesulitan menulis (*disgrafia*). Anak-anak ini sangat memerlukan pelayanan khusus, merupakan bagian dari mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus yang perlu mendapat pelayanan pendidikan yang tepat, dan dapat dikembangkan potensinya secara optimal.

Menurut Mulyasa (2004) Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah, memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran, memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisis situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan situasi sekarang. Manajemen menurut Nurkolis (2005) adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Manajemen pendidikan inklusi adalah dengan menciptakan suasana belajar yang saling mempertumbuhkan *cooperative learning*. *Cooperative learning* akan mengajarkan para siswa untuk dapat saling memahami (*mutual understanding*) kekurangan masing-masing temannya dan peduli terhadap kelemahan yang dimiliki teman sekelasnya. Dengan demikian, sistem belajar ini akan menggeser sistem belajar persaingan yang selama ini diterapkan di dunia pendidikan kita. Dalam waktu yang bersamaan, *competitive learning* dapat menjadi solusi efektif bagi persoalan yang dihadapi oleh para guru dalam menjalankan pendidikan inklusi. Pada akhirnya suasana belajar *cooperative* ini diharapkan bukan hanya menciptakan kecerdasan otak secara individual, namun juga mengasah kecerdasan dan kepekaan sosial para siswa. Pendidikan inklusi, justru menciptakan kondisi *eksklusifisme* bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler.

Anak-anak tersebut dalam paradigma pendidikan inklusif disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK ini ada dua kelompok, yaitu: ABK temporer (sementara) dan permanen (tetap). Adapun yang termasuk kategori ABK temporer meliputi: anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan (anjali), anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV-AIDS. Sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, Autis, *ADHD*

(*Attention Deficiency and Hiperactivity Disorders*), Anak Berkesulitan Belajar, Anak berbakat dan sangat cerdas (*Gifted*), dan lain-lain.

Pelaksanaan Sekolah Inklusi sendiri banyak mengalami hambatan diantaranya pelaksanaan program-program pendidikan inklusi di sekolah sehingga tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, kurikulum, serta tenaga kependidikan dan pembelajarannya. Berdasarkan observasi awal dilapangan banyak tenaga pendidik tidak memahami prosedur pendidikan inklusi, masih terlihat siswa yang susah menyerap materi pembelajaran, masih terdapat siswa inklusi tidak mau sekolah, kurangnya komunikasi dari dinas terkait terhadap implementasi pendidikan inklusi di lapangan, terdapat kebijakan sekolah yang berbelit-belit dalam pelaksanaan program inklusi, kurangnya kesiapsiagaan guru dalam pembelajaran, keterlibatan pimpinan dari pemerintahan yang minim serta kurangnya tenaga pendidik di sekolah inklusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011). Sejalan dengan Yusuf (2013) penelitian kualitatif berawal dari ketidak puasan peneliti, setelah mencermati secara mendalam kelemahan-kelemahan yang dihasilkan penelitian kuantitatif. Sehingga dengan metode kualitatif ini mampu secara terperinci menggambarkan hasil temuan di lapangan. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2002). Penentuan informan diambil dengan cara *purposive*, guna memilih orang-orang tertentu karena ada informasi dari mereka. Mereka kemudian dijadikan informan kunci. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (1992) bahwa informan haruslah orang-orang yang benar-benar mempunyai banyak pengalaman tentang masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data di lapangan menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar di Kota Padang untuk tingkat Sekolah Dasar berjumlah 534 orang, sedangkan pada jenjang tingkat Sekolah Menengah Pertama berjumlah 255 orang, jadi bila dilihat secara keseluruhan berjumlah 789 orang anak berkebutuhan khusus. Maka untuk memenuhi pelayanan ABK di sekolah dibutuhkan Guru Pembimbing Khusus (GPK) sekitar 263 orang ini apabila masing-masing GPK menangani tiga orang ABK (Megaiswari, 2013).

Pelaksanaan pendidikan inklusi ketika pembelajaran dalam kelas inklusif sama dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas reguler. Namun jika diperlukan, anak berkebutuhan khusus membutuhkan perlakuan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses *skrining* atau *assesment* yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. *Assesment* yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif (Bandi, 2006).

Anak ABK dapat belajar bersama dengan anak reguler dengan program yang sama tanpa perlu dibedakan. Program Pembelajaran Individual meliputi enam komponen, yaitu *elicitors*, *behaviors*, *reinforcers*, *entering behavior*, *terminal objective*, dan *enroute* (Bandi, 2006). Pengelolaan pola pendidikan inklusi diartikan sebagai sebuah sistem dimana mencakup *input*, proses, dan *output pendidikan* (Bambang dan Lina, 2006). Sistem pendidikan yang baik ditunjang dengan pengelolaan yang baik pula. Sehingga membentuk

pola yang diikuti dan oleh seluruh elemen-elemen yang ada di dalamnya, oleh sebab itu dalam menentukan pola yang akan digunakan perlu adanya perencanaan dalam aspek manajemen yang sangat matang, selain itu perlu juga pengawasan dan evaluasi agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Pengelolaan Pendidikan Inklusi yang berkualitas diperlukan manajemen pendidikan yang berkualitas pula. Salah satunya belum terlaksana dengan maksimal program jangka pendek yang dicanangkan, terdapat kekurangan dipihak manajerial yakni Dinas Pendidikan maupun guru sebagai tenaga pendidik yang sebagian belum memahami konsep serta belum mampu memanfaatkan kurikulum yang dirancang bagi ABK di sekolah inklusi (Ganda, 2009). Usman (2000) menyatakan manajemen mempunyai fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Implementasi manajemen pendidikan inklusi pada SD Negeri Kota Padang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan pendidikan dan keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam manajemen Pendidikan Inklusi juga membutuhkan waktu dari guru untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Selain itu dalam pelaksanaan manajemen Pendidikan Inklusi membutuhkan komitmen, visi yang jelas dan pengembangan staf. Semua karakteristik tersebut dibutuhkan dalam karakteristik manajemen Pendidikan Inklusi. Mendidik siswa tentang tantangan dan peluang dari manajemen data adalah bagian kunci dari solusi dan membantu peneliti dari masa depan untuk mulai berpikir tentang masalah di awal karir mereka (Scott, 2013).

Pendidikan inklusi adalah *hak asasi manusia*, di samping merupakan *pendidikan yang baik* dan dapat *menumbuhkan rasa sosial*. Ada beberapa argumen di balik pernyataan bahwa Pendidikan Inklusi merupakan *hak asasi manusia*: (1) semua anak memiliki hak untuk belajar bersama; (2) anak-anak seharusnya tidak dihargai dan didiskriminasikan dengan cara dikeluarkan atau disisihkan hanya karena kesulitan belajar dan ketidakmampuan mereka; (3) orang dewasa yang cacat, yang menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengawas sekolah khusus, menghendaki akhir dari segregasi (pemisahan terjadi selama ini); (4) tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan anak dari pendidikan mereka, anak-anak milik bersama dengan kelebihan dan kemandirian untuk setiap orang, dan mereka tidak butuh dilindungi satu sama lain (CSIE, 2005).

Dalam pengelolaan Pendidikan Inklusi, tanggung jawab utama (*key person*) berada di pundak kepala sekolah (*school principals*). Dikatakan demikian karena kepala sekolah merupakan faktor kunci efektif tidaknya suatu sekolah. Kepala sekolah dikatakan sebagai faktor kunci karena kepala sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan spektrum pengelolaan sekolah. Sebagai manajer pendidikan yang profesional, kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sukses tidaknya sekolah yang dipimpinya, sehingga dalam menerapkan pengelolaan Pendidikan Inklusi, peran kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan membuat peserta didik lebih cerdas (Mulyasa, 2003). Wahjosumidjo (2002) mengartikan bahwa Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Peran guru tidak cukup hanya memiliki pemahaman melalui partisipasi. Namun guru harus belajar untuk menganalisis hakekat dari kegiatan tersebut, serta bagaimana kegiatan tersebut dapat berdampak positif pada siswanya (Tarmansyah 2009). Usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi mereka yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa untuk memperoleh kesempatan belajar sama dengan siswa normal lainnya. telah dilakukan di beberapa sekolah di Kota Padang telah menempatkan siswa yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus bisa untuk belajar bersama, membaur dan berinteraksi dengan siswa normal lainnya. Kenyataan di lapangan telah memberikan indikasi bahwa ternyata ada keberhasilan yang diperoleh pihak sekolah yaitu kelainan siswa atau dengan sebutan anak berkebutuhan khusus bisa dan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk dapat berprestasi.

Peran sekolah terbesar adalah ingin membentuk anak yang soleh, sopan, pandai bergaul, pintar dan sukses, tetapi harapan besar ini jangan sampai menjadi tinggal harapan saja. Bagaimana sekolah mengelola dan mewujudkan harapan tersebut, itulah yang paling penting. Kedudukan dan fungsi suatu sekolah dalam kehidupan manusia sangatlah penting dan fundamental, dan keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab orang tuanya. Peran orang tua melekat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pengawasan yang baik dan berkelanjutan akan memberikan hasil yang baik pula terhadap hasil pekerjaan. Pengawasan merupakan proses untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Siagian (1995) pengawasan berarti mengamati dan memantau kegiatan dengan berbagai cara seperti pengawasan langsung kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan dengan berbagai cara dalam kegiatan operasional yang sedang berlangsung. Maksudnya upaya untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari rencana sebelumnya. Temuan Edwar (2011) menyebutkan pendidikan inklusif bertujuan untuk mendukung pendidikan untuk semua, yaitu untuk menerima semua anak di sekolah dengan segenap perbedaan mereka. Pendidikan inklusif agak lambat karena berbagai permasalahan dalam proses pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak siapnya guru sekolah umum untuk menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang ABK menyebabkan guru-guru tidak siap untuk menerima ABK dalam kelas. Pentingnya merapkan pilar kewiyataan dan kewibawaan dalam proses pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pengalaman dan jaringan kerja sama.

Pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah regular sangat memerlukan dukungan teknis, terutama bagi anak dengan kecacatan khusus, seperti autisme, tuna netera, tuna grahita, dan tuna rungu. Oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan institusi yang membantu sekolah regular penyelenggara pendidikan inklusif, berupa pusat sumber. Orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang luas, mendapatkan pelatihan berbagai keterampilan, memperoleh berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan inklusif. Untuk mewujudkan kesamaan hak dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagi penyandang cacat telah tersedia pelayanan pendidikan inklusi, yang memungkinkan penyandang cacat untuk belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum.

Pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam sekolah inklusi dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah simetris yang baik dan rutin dengan pihak yang berkepentingan dengan mengedepankan sikap yang ramah dan menggunakan berbagai media, membentuk pokja sekolah inklusi, melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, memberikan dukungan dan motivasi kepada para praktisi.

Pelaksanaan pendidikan inklusi Sekolah Dasar Negeri Kota Padang sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu ada penyempurnaan, seperti perlu sumber daya manusia yang mumpuni, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, menyesuaikan kurikulum materi pelajaran, dan yang lebih sulit adalah menyosialisasikan program agar dapat diterima oleh berbagai kalangan. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi membawa individu yang kurang beruntung ke dalam masyarakat yang selama ini mereka terpisahkan oleh mayoritas masyarakat karena dianggap berbeda, di antara mereka ada yang mengalami gangguan penglihatan, gangguan sensori pendengaran, hambatan perkembangan intelektual, hambatan fisik dan motorik, gangguan emosi dan perilaku, anak berbakat, tuna ganda, autisme, gangguan konsentrasi dan perhatian yang belum mendapat layanan pendidikan dan termarginalkan.

Pengelolaan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kota Padang secara manajerialnya berjalan baik dan berkelanjutan termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil

penelitian dan pembahasan terhadap Implementasi Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Kota Padang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Kota Padang belum berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa dalam aspek-aspek tertentu masih tergolong cukup, seperti perencanaan, pengetahuan pendidikan inklusi, arah pembinaan, dan kebijakan persiapan guru. Untuk aspek visi dan misi, serta kesiapan pelaksanaan tugas tergolong baik. Pengorganisasian pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Kota Padang belum terlaksana secara optimal, misalnya dalam membangun interaksi masih kurang. Dalam kegiatan organisasi, koordinasi, integrasi peserta didik, sinkronisasi pembelajaran, kerja sama, dan keterbukaan dalam kategori cukup. Pelaksanaan pendidikan inklusif masih sebatas cukup baik, hal ini terlihat dari capaian aspek-aspek yang ada semuanya hanya tergolong cukup, oleh sebab itu perlu ditingkatkan. Pengawasan pendidikan inklusif masih sebatas cukup baik, hal ini terlihat dari semua aspek hanya tergolong cukup, oleh sebab itu perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Perencanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Kota Padang memerlukan adanya sosialisasi terkait dengan pengetahuan pendidikan inklusi, oleh sebab itu peran kepala sekolah, peran guru, peran orang tua sangat diharapkan. Kemudian berkaitan dengan pengembangan, penyediaan bahan ajar bagi guru pendidikan inklusi harus disiapkan jauh-jauh hari. Guru juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan seputar anak berkebutuhan khusus, guru juga harus mengenal siswa secara keseluruhan baik fisik maupun psikis, guru juga harus dibekali dengan keterampilan pengetahuan dan cara mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, P., & Lina, M. J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bandi, D. (2006). *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Bandung. Refika Aditama
- CSIE (Centre for Studies on Inclusive Education). (2005). Ten Reasons for Inclusion. <http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/10rsns.htm>.
- Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kementerian Pendidikan Nasional, Eko Jatmiko Sukarso. (17 November 2009). Simposium Internasional dan Temu Ilmiah Nasional tentang Perkembangan Terkini Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dan Perannya Dalam Mewujudkan *Education For All*. Hotel Sahid Kusuma Solo.
- Edwar, E. (2011). *Strategi Pembelajaran Peran Guru Dalam Pendidikan Inklusif* (Disertasi) PPS. Universitas Negeri Padang.
- Ganda, S. (2009). *Anak Berkebutuhan Khusus: Cara Membantu Mereka Agar Berhasil dalam Pendidikan Inklusif*. Padang: UNP Press.
- Megaiswari. (2013). *Lingkungan inklusif ramah Terhadap pembelajaran (LIRP) pada pendidikan dasar*. Padang: UNP.
- Moleong, L. J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyasa, E. (2004). *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Rosda Karya
- Nasution, S. (1992). *Riset Kualitatif untuk Pendidikan, Pengantar ke Teori dan Metode*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Nurkolis. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Grasindo.
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Scott, M. (2013). *Research Data Management Education for Future Curators*. The International Journal of Digital Curation. The IJDC is published by the University of Edinburgh.

- Siagian, S. (1995). *Manajemen Abad ke-21*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. (2009). *Perspektif Pendidikan Inklusif: Pendidikan Untuk Semua*. Padang: UNP Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Dasar 1945
- Usman, M. U. (2000). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahjosumidjo. (2002). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Padang: UNP Press.